

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2007, Sanksi Pidana dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Rafika Aditama, , Surabaya.
- Arba, H.M, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Grafika, Jakarta
- Bakri, Muhammad, Edisi Revisi 2011, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara*, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Hasan, M.Iqbal, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta.
- Harsono, Budi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Implementasinya*, Djambatan, Jakarta.
- Indiraharti, 2009, *Penerapan Sistem Torrens dalam Pendaftaran Tanah (Studi Komparatif terhadap Sistem Pendaftaran Tanag di Indonesia dengan Singapura)*, Jakarta.
- Ismaya, Samun, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Marbun, SF., 2001, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press Yogyakarta.
- Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit LKiS, Yogyakarta
- Perangin, Effendi, 1986, *Hukum Agraria Indonesia (Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Poesponoto Soebakti, 1987, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, PT. Pradaya Paramita, Jakarta
- Ruchiyat, Eddy, 1983, *Pelaksanaan Landreform dan Jual gadai Tanah*, Percetakan Offset CV. Armiko.
- Raharjo, 1986, *Pelaksanaan Hukum Indonesia*, Ghaia, Bandung.
- Soekamto Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta.

Suharso, P., 2017, *Sosiologi Kontemporer*, Universitas Jember.

Sumarjono, Maria S.W., *Pedoman Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sumitro, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Waskito dan Hadi Arnowo, 2017, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria

Undang-undang 56/Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1960

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian secara Guntai (Absentee) bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional



Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian

C. Karya Ilmiah

Elva Kurnia Dewi, 2010, “Peran Kantor Pertanahan dalam Mengatasi Kepemilikan Tanah Absentee di Kabupaten Magelang”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Agus Suherlie, 2006, “Strategi Peralihan Hak atas Tanah yang Menyebabkan Kepemilikan Tanah Absentee di Kabupaten Karanganyar”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Internet

<https://klatenkab.bps.go.id/statictable/2015/09/10/41/luas-wilayah-menurut-kecamatan-lahan-pertanian-dan-lahan-bukan-pertanian-di-kabupaten-klaten-tahun-2015-ha-.html>